



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI GORONTALO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERUM FAJAR WATI
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 97596

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.780.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/250 m2 di SLEMAN, WARISAN Rp. 600.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 3500 m2 di LAMPUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 988 m2 di KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/104 m2 di KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 77.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 15.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.872.000.000

III. HUTANG

Rp. 120.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.752.000.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2021/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMAN TEGUH RAHARTO
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
3. NHK : 628576

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 923.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/32 m2 di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/32 m2 di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/63 m2 di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 104 m2 di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
6. Tanah Seluas 350 m2 di TEGAL, WARISAN Rp. 105.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
8. Tanah Seluas 100 m2 di SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 46.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU KARIMUN WAGON CITY CAR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, SUZUKI SPIN MATIC Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 4.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	174.862.095
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.148.362.095
III. HUTANG	Rp.	93.181.911
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.055.180.184

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2021/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NOVA MULYATI
2. Jabatan : KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN
3. NHK : 803640

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.031.000.000

1. Tanah Seluas 334 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG PANJANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/54 m2 di KAB / KOTA
SOLOK, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m2/218 m2 di KAB / KOTA KOTA
PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 586.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 101.500.000

1. MOTOR, YAMAHA SPM/SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
6.500.000
2. MOBIL, GRAND LIVINA MATIC Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
95.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 27.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 31.306.093

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.190.806.093

III. HUTANG Rp. 93.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.097.806.093

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2021/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SHINTA SWARLIKA
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 803851

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	300.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	18.500.000
1. MOTOR, YAMAHA NMAX MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	16.720.825
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	23.076.178
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	358.297.003
III. HUTANG	Rp.	108.714.266
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	249.582.737

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.